

MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA ALAM OLEH PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN BANDUNG

Jusmalia Oktaviani¹, Suwarti Sari², dan Taufan Herdansyah Akbar³

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Ahmad Yani,
Jalan Terusan Jenderal Sudirman PO BOX 148 Cimahi, Jawa Barat

Abstrak

Indonesia adalah negara yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Berbagai daerah di Indonesia mengalami hal tersebut, termasuk Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung yang wilayahnya sangat rawan mengalami banjir, longsor, serta gempa. Mekanisme pemberian bantuan serta penanggulangan bencana sangat penting untuk dilaksanakan dengan cepat dan tepat untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan adalah Palang Merah Indonesia, yang mana dalam penelitian ini difokuskan pada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung.

Kata kunci: bencana, bantuan, kemanusiaan, Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung, kerentanan.

Abstract

Indonesia is a country that is susceptible to various types of natural disasters. Various regions in Indonesia have experienced those, including West Java Province, especially Bandung Regency, whose territory is very vulnerable to floods, landslides, and earthquakes. The mechanism for aiding and disaster management is fundamental to be carried out quickly and precisely to avoid falling casualties. One of the institutions that have the authority and ability to channel humanitarian assistance is the Indonesian Red Cross, which in this study focused on the Indonesian Red Cross in Bandung Regency.

Keywords: *disaster, aid, humanity, Indonesian Red Cross, Regency of Bandung, vulnerability.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang rawan dengan berbagai bencana alam. Terletak di atas patahan lempeng tektonik dengan deretan gunung berapi

¹ Dosen tetap pada Jurusan Hubungan Internasional, Unjani, Email: Jusmalia.oktaviani@lecture.unjani.ac.id

² Dosen tetap pada Jurusan Hubungan Internasional, Unjani, Email: Suwartisari73@gmail.com

³ Dosen tetap pada Jurusan Hubungan Internasional, Unjani, Email: Taufanakbar10@gmail.com

aktif, berbagai daerah di Indonesia beresiko menghadapi bencana alam mulai dari gunung berapi, gempa, angin puting beliung, yang berdampak pada bencana lanjutan seperti tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan seterusnya. Masyarakat di Provinsi Jawa Barat (Jabar) juga tidak luput dari resiko bencana alam. Seperti yang dikutip oleh Ketua Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, Dicky Saromi, dalam Reni (2017), menyatakan bahwa banjir dan longsor adalah jenis bencana yang paling banyak menimpa wilayah itu. sebanyak 35 persen kejadian bencana alam di Jawa Barat didominasi karena faktor hidrometeorologi, misalnya banjir. Sementara 30-an persen disusul oleh bencana longsor.

Provinsi ini bisa dikatakan memiliki jenis bencana beragam (*multi-hazard*). Selain banjir dan longsor, lima jenis bencana lain yang terjadi di Jawa Barat antara lain: gempa bumi; gunung berapi; penyakit; kegagalan teknologi; kebakaran hutan dan sampah; serta kerusuhan sosial. Pada rentang Januari-Desember 2016, tanah longsor menempati jumlah kejadian tertinggi di Jawa Barat, yaitu 480 kali, lalu bencana kebakaran sebanyak 257 kali. Menempati posisi ketiga yaitu bencana banjir sebanyak 215 kali, bencana Puting Beliung terjadi sebanyak 185 kali dan gempa bumi sebanyak 48 kali. Di tahun 2017 sendiri, dari bulan Januari-Maret, tercatat kejadian kebakaran 81 kali, banjir 62 kali, tanah longsor 170 kali, puting beliung 102 kali dan gempa bumi 59 kali. Kejadian-kejadian tersebut merupakan kejadian bencana yang intensitasnya besar dan laporannya diterima oleh BPBD Provinsi Jawa Barat (Reni 2017).

Kabupaten Bandung juga sering mengalami bencana longsor dan banjir bahkan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Pada bulan Oktober 2017, bencana tanah longsor terjadi di Kampung Muara, Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peristiwa itu mengakibatkan empat orang yang merupakan satu keluarga menjadi korban akibat tertimbun longsoran tanah (Rina 2017). Sementara pada November 2017, dari data BPBD Kabupaten Bandung, Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang. Jumlah rumah tergenang mencapai 4.097 unit, 10 gedung sekolah, dan 27 tempat ibadah. Jumlah pengungsi mencapai 1.033 jiwa (Dendi 2017).

Salah satu aktor yang berperan dalam penanggulangan bencana adalah Palang Merah. Di dunia internasional Palang Merah disebut dengan ICRC (*The International Committee of the Red Cross*). Palang Merah memiliki posisi yang penting sekaligus juga unik dalam struktur internasional karena statusnya yang khusus, tidak bisa digolongkan sebagai organisasi internasional maupun *non-governmental organizations*. Dalam bidang kemanusiaan, Palang Merah memiliki cakupan atau jangkauan yang sangat luas karena selain memiliki keanggotaan lebih dari 190 negara-anggota yang disebut Perhimpunan Nasional (*National Societies*) (IFRC, “National Societies Directory”, n.d.), dengan prinsip-prinsipnya yakni: *humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary service, dan unity and universality* (IFRC, “Promoting principles and values”, n.d.), sehingga cakupan bantuan kemanusiaan yang bisa diberikan oleh Palang Merah juga beragam.

Kehadiran Palang Merah di berbagai belahan dunia antara lain untuk membantu meringankan penderitaan manusia. Di Indonesia sendiri, Palang Merah Indonesia telah diakui keberadaannya sejak tahun 1950 dan kini telah berada di berbagai wilayah untuk meringankan penderitaan manusia dari berbagai bencana, termasuk di Kabupaten Bandung. Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung berdiri pada tanggal 17 September 1985, dilantik oleh Pengurus PMI Jawa Barat (PMI Kabupaten Bandung, n.d.)

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, isu-isu *low-politics* termasuk isu kemanusiaan atau *humanitarian issue*, saat ini telah menjadi perhatian oleh para peneliti dan pengkaji di bidang ini. Sebagai wilayah yang rawan terhadap bencana, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung melaksanakan tugasnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan terutama dalam konteks penanggulangan bencana alam di daerah Kabupaten Bandung. Oleh sebab itu, penelitian ini diberi judul **“Mekanisme Penanggulangan Bencana Alam Oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung”**.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk memahami fenomena-

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi serta aktivitas (Moleong 2006). Data yang didapat dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dimana data primer didapat dari *Focus Group Discussion* (FGD), yakni peneliti melakukan metode riset kualitatif dengan mengadakan diskusi terfokus dari suatu grup atau kelompok untuk membahas suatu hal tertentu. Pengumpulan data dengan FGD ini dilakukan karena PMI Kabupaten Bandung terdiri dari beberapa staf yang mengurus bidang yang berbeda sehingga diperlukan suatu diskusi kelompok untuk membahas jawaban dari rumusan masalah penelitian. Data sekunder didapat dari berbagai dokumen yang diperlukan peneliti. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang bersumber pada literatur-literatur yang dianggap relevan dengan kajian penelitian. Data ini kemudian menambah serta mengecek data primer yang diperoleh dari pelaksanaan FGD, untuk menguji keabsahan data.

TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa penelitian yang menjadi rujukan untuk penulisan penelitian, di antaranya adalah:

1. **Jusmalia Oktaviani, Christy P. Kumesan, Saltilq Fajar. Analisis Pemetaan Kerentanan Masyarakat Terhadap Bencana Gempa: Studi Kasus Gempa di Haiti Tahun 2010. Jurnal Sospol Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2017, Hlm 42-57**

Penelitian ini berfokus pada analisis kerentanan masyarakat pada Gempa Haiti tanggal 12 Januari 2010. Haiti adalah negara yang sangat rentan terhadap bencana, bahkan jauh sebelum gempa besar yang melandanya pada 12 Januari 2010. Kerentanan manusia terhadap bencana, bisa dilihat dari tiga pandangan, yakni melihat alam sebagai penyebab, biaya sebagai penyebab, atau struktur sosial sebagai penyebab. Kerentanan manusia terhadap bencana dianggap sebagai masalah yang bersifat ‘*seasonal/musiman*’. Padahal masalah struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil bisa berdampak pada kerentanan masyarakat terhadap bencana semenjak sebelum, selama, dan sesudah bencana itu terjadi.

Melalui gempa Haiti, ada aspek-aspek kerentanan yang sebenarnya bisa dihindari agar di masa depan tidak terjadi jatuhnya korban jiwa yang tidak perlu. Melalui teknik pengumpulan data sekunder, hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan, faktor pertama, yakni alam sebagai penyebab, justru tidak banyak menyumbang dalam tingginya tingkat kematian di Haiti. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah kematian pada gempa Haiti tahun 2010, justru berasal dari faktor ‘manusia’, seperti kemiskinan, tidak adanya standar bangunan pembangunan di daerah beresiko gempa bumi dan banjir, kepadatan penduduk yang tinggi di daerah-daerah tertentu, kurangnya infrastruktur, perencanaan tata kota yang buruk, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pertolongan pertama dan lain-lain. Hal tersebut di atas memberikan kontribusi untuk menciptakan kerentanan terhadap aspek “sosio-natural” bencana, sebuah konsep yang menunjukkan bahwa peristiwa alam hanya menjadi bencana ketika bencana itu mempengaruhi masyarakat yang tidak siap menghadapinya. Selain itu, sangat penting bagi pemerintah pusat, pemerintah lokal, dan komunitas atau LSM di Haiti memiliki pola koordinasi yang baik dan terstruktur, terutama karena negara itu termasuk ke dalam wilayah rawan bencana.

Dengan teori yang sama, penelitian lanjutan bisa dilakukan di daerah rawan bencana lain, seperti Indonesia. Penelitian tentang kebencanaan perlu terus dilakukan, agar masyarakat tidak mudah menyalahkan ‘alam’ sebagai faktor penyebab utama dalam hilangnya korban jiwa, tanpa melihat pada kesalahan manusia itu sendiri sebagai kontributor terbesar dalam bencana alam.

2. Gatignon, Aline, Luk N. Van Wassenhove, dan Aurelie Charles. The Yogyakarta Earthquake: Humanitarian Relief Through IFRC’s Decentralized Supply Chain International Journal of Production Economics 126 (2010) 102-110 www.elsevier.com/locate/ijpe DOI: 10.1016/j.ijpe.2010.01.003

Penelitian ini mendalami tentang bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh IFRC (Palang Merah Internasional) melalui mekanisme baru yang disebut dengan ‘*decentralized supply chain*’/ rantai persediaan terdesentralisasi. Sebelumnya, mekanisme penyediaan bantuan dilakukan oleh Palang Merah

Internasional secara terpusat melalui Palang Merah Internasional di Jenewa, Swiss. Hal ini mengakibatkan bantuan yang diberikan oleh lembaga itu seringkali lambat dan memakan biaya lebih banyak. Setelah melakukan evaluasi, terutama setelah beberapa bencana di beberapa belahan dunia yang membuktikan bahwa pemberian suplai bantuan dari Palang Merah terbukti kurang efektif, akhirnya lembaga internasional itu mengganti mekanismenya yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi.

Dengan sistem desentralisasi ini, maka rantai persediaan bantuan bagi keadaan gawat darurat bisa dipercepat dengan didirikannya tiga ‘cabang’ Palang Merah yang disebut RLU’s (*Regional Logistics Units*)/ Unit Logistik Regional. RLU ini bertugas untuk menyediakan dukungan secara regional bagi seluruh 186 anggota Palang Merah Internasional, terutama dengan membantu pengelolaan rantai persediaan bantuan dari para donor dan petugas di lapangan. Tiga RLU ini didirikan di Singapura, Panama, dan Dubai yang menjadi cabang bagi kawasan masing-masing, dimana kawasan RLU kawasan Asia khususnya Indonesia berada di bawah RLU Singapura.

Penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yang pertama adalah menekankan pentingnya sistem *decentralized supply chain* ini untuk diimplementasikan oleh IFRC mengingat perubahan yang mendorong IFRC untuk terus berbenah, baik dari sisi internal maupun eksternal. Yang kedua adalah mengevaluasi model baru IFRC ini melalui analisis terhadap gempa Yogyakarta tahun 2006, yang sekaligus menjadi uji coba pertama bagi model desentralisasi ini. Yang terakhir adalah menunjukkan betapa pentingnya peran dari sistem rantai global yang baik terhadap keberhasilan model baru Palang Merah.

Melalui penelitian ini, keberhasilan IFRC menerapkan sistem terdesentralisasi ini terbukti melalui gempa Yogyakarta pada tahun 2006 tersebut, dimana pemberian bantuan kemanusiaan bisa diberikan dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Dari penelitian yang dilakukan di Yogyakarta ini, maka penelitian di kawasan lain di Indonesia juga diperlukan, karena daerah lain di Indonesia pun juga mengalami kerentanan yang mirip terhadap bencana alam.

A. Konsep Kerentanan untuk Mekanisme Penanggulangan Bencana

Menurut Heijmans (2004), dalam melihat bencana, terdapat tiga macam pandangan dan strategi pencapaian dalam menunjukkan kerentanan masyarakat terhadap bencana, yaitu 1) alam sebagai penyebab; 2) biaya sebagai penyebab; 3) struktur sosial sebagai penyebab. Alam sebagai penyebab (*Nature as cause*), dalam pandangan ini menghadirkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai solusi. Dalam pandangan ini, alam dan bencana alam dipandang sebagai sebab dari kerentanan manusia terhadap bencana. Agar dapat mengurangi kerentanan tersebut, diperlukan sistem untuk dapat memprediksi datangnya bahaya dan rancangan serta pengaplikasian teknologi yang memungkinkan manusia untuk bertahan dari dampak negatif suatu bencana (misalnya alat untuk memonitor aktivitas gempa bumi, ramalan cuaca, memonitor kekeringan dan kebakaran, sistem pengontrol air, serta keamanan bangunan, dll.).

Kedua, biaya sebagai penyebab (*Cost as cause*), yang mana pandangan ini berfokus pada solusi dalam aspek ekonomi dan keuangan. Meskipun kapasitas IPTEK sudah ditingkatkan dan diperbaiki, namun manusia terkadang masih mengalami penderitaan karena teknologi mitigasi dan prediksi bencana memakan biaya yang besar. Dalam pandangan ini, kerentanan akan berkurang apabila pemerintah domestik menyesuaikan jaring pengaman sosial yang aman, dana untuk bencana dan asuransi jiwa, serta menyediakan bantuan keuangan untuk meningkatkan aset penduduk.

Pandangan terakhir yakni Struktur sosial sebagai penyebab (*Societal Structure as cause*), yang menawarkan politik sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi. Bukan hanya terpapar akan bahaya dari ancaman bencana tersebut, namun proses sosio-ekonomi dan politik dalam lingkungan masyarakat juga mendorong tingkat keparahan kerentanan masyarakat. Hal demikian menciptakan kondisi yang mempengaruhi kemampuan masyarakat atau negara dalam merespons situasi bencana, sehingga berpengaruh pula pada lambatnya masyarakat untuk pulih dari efek destruktif suatu bencana. Kondisi seperti ini berlaku dari pra, saat bencana, bahkan menetap hingga pasca bencana.

B. SEJARAH DAN GERAKAN PALANG MERAH

1. Gambaran Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional

The International Red Cross and Red Crescent Movement/ Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional terdiri atas hampir 100 juta anggota, sukarelawan, dan lain-lain. Tiga komponen utamanya yakni: *The International Committee of the Red Cross (ICRC)*/ Komite Internasional Palang Merah; *The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)*/ Federasi Internasional Perhimpunan-perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah; dan lebih dari 190 Perhimpunan-perhimpunan nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC “The Movement”, n.d.). Kegiatannya punya satu tujuan pokok: mencegah dan meringankan penderitaan manusia, tanpa diskriminasi dan melindungi harkat martabat manusia.

ICRC, Federasi Internasional, dan Perhimpunan Nasional masing-masing negara adalah organisasi yang masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing memiliki statusnya sendiri dan tidak punya wewenang atas yang lainnya. ICRC adalah lembaga pendiri Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yang bertugas melindungi korban konflik bersenjata, serta memelihara Hukum Humaniter Internasional. Federasi Internasional bertugas mengarahkan dan mengkoordinasi bantuan internasional yang diberikan oleh Gerakan. Perhimpunan Nasional adalah pendukung (*auxiliaries*) bagi pemerintah negara masing-masing, dan mewujudkan pekerjaan dan prinsip Gerakan di 180 negara. Organisasi tersebut bertemu dua tahun sekali dalam sebuah pertemuan Dewan Delegasi. Selain itu, mereka juga bertemu dengan para wakil dari negara-negara peserta Konvensi-konvensi Jenewa setiap empat tahun sekali dalam Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional antara lain menurut IFRC (“The Movement”, n.d.): Kemanusiaan; Kesamaan; Kenetralan; Kemandirian; Kesukarelaan; Kesatuan; Kesemestaan. ICRC mendapat sumbangan dari: Negara-negara peserta Konvensi Jenewa (pemerintah); perhimpunan Nasional; Organisasi supranasional; masyarakat dan swasta. Sumbangan bersifat

sukarela dan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya uang tunai, bahan pangan atau bahan non-pangan; pelayanan, misalnya staf spesialis.

ICRC mempunyai tugas untuk mengawal Hukum Humaniter. Oleh karenanya, ICRC bersifat netral. ICRC berdasarkan prakarsanya atau konvensi-konvensi Jenewa 1949 berkewajiban memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban dalam pertikaian bersenjata internasional maupun kekacauan dalam negeri. Persyaratan pendirian suatu perhimpunan nasional diantaranya adalah: Mendapat pengakuan dari pemerintah negara yang sudah menjadi peserta Konvensi Jenewa; dan Menjalankan Prinsip Dasar Gerakan. Bila demikian ICRC akan memberi pengakuan keberadaan perhimpunan tersebut sebelum menjadi anggota Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (“Palang Merah Indonesia”, n.d.).

2. Sejarah PMI Kabupaten Bandung

Pada bulan Oktober tahun 1984 ketua panitia gerakan bulan dana PMI Cabang Bandung Asikin Kahum (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung) melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Kabupaten Bandung saat itu, Sani Lupias. Karena keberhasilan pengumpulan dana tersebut, beliau mengarahkan kepada Asikin Kahum agar Kabupaten Bandung memiliki PMI cabang sendiri, memisahkan diri dari Kotamadya Bandung. Atas arahan Bupati Kabupaten Bandung tersebut, Asikin Kahum mengajukan permohonan pembentukan PMI Kabupaten bandung kepada Pengurus PMI Pusat melalui PMI Jawa Barat. Atas respons dari PMI pusat pada tanggal 17 September 1985 pengurus PMI Kabupaten Bandung masa bakti 1985 – 1989 dilantik oleh Pengurus PMI Jawa Barat. Dengan ketua PMI Kabupaten Bandung yang pertama adalah Drs. H. Adam Hidayat, SH. (PMI Kab.Bandung “Profil PMI Kabupaten Bandung”, n.d.).

Saat ini PMI Kabupaten Bandung menempati Gedung sendiri yang berlokasi di Jl. Terusan Al-fathu Km.17 Soreang semenjak tahun 2010. Gedung tersebut merupakan bantuan PT Bank Jabar Banten dari dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebesar Rp. 950.000.000,- dengan luas bangunan 450 meter persegi di atas tanah milik Pemda Kabupaten Bandung seluas 1000 meter persegi. Kapasitas SDM yang dimiliki antara lain sebagai berikut: Pengurus sebanyak 11

orang; Staf Markas sebanyak 11 orang; Staf poliklinik sebanyak 8 orang terdiri dari 4 orang Dokter, 3 orang perawat dan 2 orang administrasi; Anggota KSR(Korps Sukarela) sebanyak 40 orang yang aktif; Tenaga Sukarela (TSR); Anggota KSR Unit Perguruan Tinggi; Anggota Sibat; Relawan Flu Burung, dan Anggota PMR yang terdiri atas: PMR Mula (SD), PMR Madya (SLTP), dan PMR Wira (SLTA) (PMI Kab.Bandung “Profil PMI Kabupaten Bandung”, n.d.).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Organisasi PMI Kabupaten Bandung dan Kaitannya terhadap Penanggulangan Bencana Alam

Sebagai salah satu lembaga internasional terbesar dunia, pada dasarnya semua PMI sama, baik itu dalam skala global hingga pada tingkat kecamatan atau desa di Indonesia. Didasarkan pada hasil FGD, dengan pengakuan (landasan hukum) yang dulunya berupa Keppres hingga pada awal tahun 2018, kini PMI telah memiliki Undang-undang mengenai Kepalangmerahan yang salah satunya mengatur mengenai teknis dan bantuan dana. UU ini membuat PMI memiliki posisi yang kuat, sehingga kedudukan PMI ini menjadi berbeda dengan LSM lainnya. Landasan hukum ini sangat diperlukan karena status unik PMI, yang bukan LSM dan bukan bagian dari pemerintah namun diakui di seluruh dunia. Artinya, PMI Indonesia memiliki kekuatan hukum tetap yang memiliki keabsahan yang lebih dari pada sebelumnya sehingga UU ini akan sangat membantu bagi pihak PMI dalam menjalankan program-program dan aktivitas mereka.

Menurut Sekretaris PMI Kabupaten Bandung, Entang Sukandar, dalam kaitannya dengan bencana, tugas utama PMI sesuai arahan Jusuf Kalla sebagai ketua PMI Indonesia yakni bendera PMI sudah harus berada di lokasi bencana, maksimal 6 jam setelah terjadinya bencana (sudah melakukan penanganan secara cepat). Untuk itu PMI Kab. Bandung sendiri mengusahakan setiap terjadi bencana PMI selalu siap siaga.

Untuk mewujudkan arahan dari Ketua PMI Indonesia tersebut, PMI Kabupaten Bandung memiliki ranting (cabang di desa/daerah) yang siap menghubungi kantor PMI bila ada kejadian bencana. Di kantor PMI sendiri, selalu

ada Satuan Siaga Bencana (Satgana), yang siaga 1 x 24 jam setiap harinya. Sekretaris PMI Entang Sukandar menggambarkan Satgana itu harus siap mengerjakan apapun, dimanapun, bahkan mampu membawa tugas di kantor ke tempat terjadinya bencana seperti mendirikan posko dan lain-lain.

PMI Kabupaten Bandung mendapat dana hibah dari Pemerintah Provinsi sebesar 300 juta rupiah setiap tahunnya. Selain itu, PMI juga menyelenggarakan bulan dana, yang pemasukannya mencapai lebih dari 1 miliar. Dana inilah yang kemudian diunakan untuk kegiatan rutin, pemeliharaan gedung, penunjang kegiatan PMI, termasuk honorarium bagi para pegawai yang bekerja di PMI Kabupaten Bandung. Sesuai dengan pernyataan Sekretaris PMI Kabupaten Bandung tersebut, dana yang tercapai dan didapatkan oleh PMI mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2015, PMI mencatat penerimaan sebesar Rp.1.369.083.000,-, yang kemudian pada tahun 2016, mereka mendapatkan dana sebesar Rp.1.525.918.000,- dari target Rp1,5 miliar. Pada penyerapan bulan dana tahun 2016, beberapa gerakan kemanusian yang dilakukan PMI diantaranya penanggulangan bencana banjir, longsor, puting beliung dan kebakaran. Selain itu, kegiatan PMI meliputi pelayanan ambulans untuk merujuk pasien, mengantar jenazah, dll, pengembangan SDM dan relawan Palang Merah Remaja (PMR), Korps Sukarela (KSR), tenaga sukarela. Khusus untuk pelayanan ambulans, PMI Kabupaten Bandung telah siap siaga ambulans 24 jam di posko Markas, serta siaga PP Ambulans pada saat Hari Raya Idul Fitri dan Tahun baru.

2. Penanggulangan Bencana dan Mekanisme Koordinasi dengan Lembaga Lain

Pada dasarnya, setiap PMI di seluruh Indonesia harus memiliki Renkon (Rencana Kontijensi) penanggulangan bencana yang merupakan syarat mutlak sebelum disusunnya sebuah SOP. Pada tingkat pelaksanaannya baru disebut Rencana Operasi (Renop) dan itu adalah standar yang harus dilaksanakan sesuai kesepakatan PMI Pusat. Jika mengacu ke hal tersebut, maka PMI di Kab. Bandung dapat dianggap sudah memiliki Renkon mengenai ancaman banjir, longsor, dll.

Dalam setiap bencana, terutama bencana dengan skala yang cukup besar, akan ada keterlibatan beberapa lembaga kemanusiaan dan non-kemanusiaan dalam bencana tersebut, misalnya SAR, BPBD, Pemadam Kebakaran, PMI, TNI, perwakilan pemerintah pusat dan daerah, partai politik, LSM, dan lain-lain. Untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganannya, mekanisme koordinasi sangat diperlukan. Dalam FGD, terungkap, bahwa menurut Entang Sukandar, untuk kejadian bencana terutama bencana besar seperti longsor, banjir, tsunami, dsb, biasanya pihak pemerintah yang memberikan *Standar Operational Procedure* atau berada di bawah koordinasi pemerintah atau militer. PMI tentunya juga tidak dapat bergerak sendiri, sehingga PMI harus menghormati keputusan/kebijakan tiap-tiap pemerintah daerah. Namun, sesuai dengan Tupoksi PMI, PMI harus tetap paling awal dan terdepan dalam hal mobilisasi siaga bencana, terutama untuk *assessment* lokasi. Jalaludin mengungkapkan, bahwa untuk hubungan dengan BPBD, PMI menjalin *roll-call* atau pertukaran informasi sesuai dengan MoU yang telah disepakati. MoU juga dijalin dengan Pemadam Kebakaran maupun Dinas Pendidikan.

Kerjasama dengan toko-toko di sekitar PMI dilaksanakan untuk penyimpanan barang-barang yang punya jangka waktu pendek. Dana yang telah masuk sebagian didepositkan beberapa toko milik masyarakat sekitar. Sehingga ketika terjadi bencana, pihak PMI tinggal mengambil barang-barang kebutuhan yang diperlukan. Barang yang memiliki kadaluarsa yang lama, seperti seperti perahu karet, tenda dan generator, disimpan di gudang milik PMI Kabupaten Bandung. Sesuai dengan karakteristik daerah Kabupaten Bandung, PMI Kabupaten Bandung memiliki truk tangki air. Mobil tangki itu sendiri merupakan milik PMI pusat yang dititipkan untuk dipergunakan dan dirawat. Wilayah Kabupaten Bandung adalah wilayah yang rentan terhadap banjir dan ketika banjir melanda, air bersih sulit untuk diakses, sehingga keberadaan truk tangki air ini sangat vital. Selain perlengkapan maupun logistik, tidak kalah penting untuk mempunyai sumber daya manusia yang tangguh bencana. Untuk saat ini PMI Kab. Bandung telah merekrut relawan sebanyak 13 angkatan, dengan jumlah

keseluruhan kurang lebih 235 orang yang tersebar masing masing berdomisili di 31 Kecamatan di kab. Bandung.

Keaktifan dari PMI Kabupaten Bandung dan relawannya bisa dilihat dalam salah satu contoh kejadian bencana yang terbaru, yakni angin puting beliung yang terjadi di Rancaekek, Kabupaten Bandung, tanggal 11 Januari lalu. Hanya dalam waktu setengah jam setelah kejadian, kader PMI sudah ada di lokasi kejadian dan melakukan tindakan *assessment*. Dalam FGD diungkapkan oleh Yaumas, staf Bagian Penanggulangan Bencana bahwa:

“Untuk penindakan sendiri tentu assessment merupakan tindakan yang vital karena dari assessment tersebut kita bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Assessment kami tekankan pula terhadap seluruh anggota kami karena jika menguasai assessment atau anggota tersebut dapat mengkaji secara cepat maka bantuan yang tiba pun akan efektif. Tindakan ini secara berkelanjutan di-update setiap 6 jam sekali, karena keberadaan pengungsi pun tentu akan berpindah-pindah, ada bermacam-macam pengungsi itu mulai dari anak-anak hingga manula dan tentu kebutuhan mereka pun berbeda-beda. Lalu setelah itu kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberitahukan kebutuhan apa saja yang belum didapatkan.”

Salah satu keunikan atau kekhasan PMI Kab. Bandung adalah keberadaan poliklinik yang cukup memadai, dengan adanya dokter gigi dan dokter umum, sehingga BPJS pun bisa digunakan di poliklinik ini. Hasil dari dana poliklinik ini secara swadaya cukup untuk menambah dana di kantor PMI Bandung. Di masa mendatang, PMI Kab. Bandung berencana membuka fasilitas cuci darah yang diharapkan bisa memberikan manfaat baik bagi masyarakat sekitar. Selain itu, untuk terus memberikan edukasi pada masyarakat, PMI Kab. Bandung membuat siaga bencana berbasis siswa, berbasis masyarakat, dan bahkan berbasis keluarga, meski tantangan utamanya terbentur dengan ketersediaan dana, karena untuk satu sekolah saja dibutuhkan dana yang tidak sedikit apalagi untuk satu kabupaten Bandung.

3. Kegiatan Penunjang Kesiapsiagaan Bencana

Dalam tata laksana kebencanaan, PMI baik PMI Pusat maupun daerah sudah mengaplikasikan kegiatan-kegiatan, dari sebelum, saat kejadian, maupun sesudah bencana. Kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan standar dan operasi

yang telah ditetapkan oleh Federasi Palang Merah. Berdasarkan analisis dari FGD serta pengumpulan data sekunder, peneliti melakukan kategorisasi kegiatan-kegiatan PMI Kabupaten Bandung yang penting dan menyangkut pencegahan bencana sebagai berikut:

i. Donor Darah

Kegiatan Donor Darah memang cukup lekat dengan PMI, mengingat PMI Indonesia sendiri menjadikan Donor Darah sebagai salah satu kegiatan atau program rutin, meskipun kegiatan PMI sebenarnya jauh lebih luas dari donor darah. Terkait dengan kegiatan donor darah PMI Kabupaten Bandung sendiri, PMI kabupaten Bandung memiliki Unit Transfusi Darah yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Keberadaan Unit Transfusi darah di PMI ini menurut peneliti sangat membantu masyarakat, karena UTD PMI ini berada di bawah BPOM RI. Selain itu, cadangan darah di PMI sangat diperlukan terutama ketika stok darah di rumah sakit sedang menipis. Meski demikian, tetap ada kerjasama antara PMI Kab. Bandung dengan Rumah Sakit untuk aktif menjajak masyarakat umum mendonorkan darahnya. Contohnya adalah saat PMI Kabupaten Bandung menggelar kerjasama dengan RSUD Cicalengka dalam melaksanakan Donor Darah pada tanggal 12 April 2018 (Jabar Ekspress, n.d.).

ii. Pengembangan Karakter Generasi Muda

Salah satu kegiatan yang berupaya untuk melatih anak-anak sejak usia dini salah satunya adalah keberadaan PMR (Palang Merah Remaja) dan Korps Sukarela. Dalam perjalannya PMI menyadari bahwa membangun generasi berperikemanusiaan adalah pekerjaan yang panjang dan harus dimulai sejak usia dini. Lomba-lomba PMR pun sering dilaksanakan antarsiswa, karena lomba PMR sangat baik untuk mengembangkan kedulian sosial pada anak, menimbulkan rasa kasih sayang antarsesama, serta membiasakan saling menolong sejak dini. Selain baik untuk pengembangan karakter, PMR juga dikembangkan karena Kabupaten Bandung termasuk dalam kategori rawan bencana. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan generasi muda yang terlatih dalam memberikan pertolongan dan melakukan evakuasi saat bencana terjadi. Program ini pada dasarnya adalah pembinaan *Character Building* yang berkaitan kepada perekrutan KORPS

sukarela dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan tujuan utama mempersiapkan Kader yang memiliki mental serta interaksi sosial yang baik.

Penyelenggaraan kegiatan berbasis generasi muda ini salah satu contohnya diselenggarakan PMI kabupaten Bandung memperingati Hari PMI ke 72 yang digelar di Markas PMI Kab. Bandung tanggal 8 Oktober 2017. Kegiatan tersebut diikuti oleh kurang lebih 1400 peserta dari unsur anggota PMI dan PMR dari 120 sekolah tingkat SMP dan SMA se-kabupaten Bandung. Kegiatan diisi dengan rangkaian kegiatan perlombaan, bakti sosial, pembentukan Forum Tenaga Sukarela Unsur Pembina tingkat kabupaten, dan Forum PMR tingkat kabupaten (Sulaeman, 2018).

Pada saat pasca bencana, PMI juga memiliki program yang juga menyentuh aspek psikologis anak-anak yaitu dengan adanya program *Psychosocial Support Program* (PSP) yang menangani korban trauma terutama anak-anak. Jadi penindakan bukan hanya ketika bencana terjadi namun juga hingga pasca bencana karena korban paling rentan terdampak bencana adalah anak-anak.

Sebagai bentuk sosialisasi tentang penanggulangan bencana, PMI memiliki kurikulum untuk penyampaian materi di sekolah-sekolah sejak tahun 2003. Masing-masing tingkatan di PMR memiliki jam belajar intensif, untuk tingkat Mula 66 jam, tingkat Madya 87 jam dan tingkat Wira 102 jam. Tapi berdasarkan keterangan Jalaludin yang membidangi Kesiapsiagaan Bencana, kendalanya ada pada penyampaian materi tersebut ke sekolah-sekolah. Kesan yang didapat dari belajar mengenai PMR adalah kompetisi atau lomba Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) atau pembuatan tandu, padahal hal penting yang harus diketahui anak-anak adalah materi tentang kesiapsiagaan saat bencana terjadi, seperti hal yang harus dilakukan saat gempa, tsunami, banjir, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Kerentanan manusia terhadap bencana, bisa dilihat dari tiga pandangan, yakni melihat alam sebagai penyebab, biaya sebagai penyebab, atau struktur sosial

sebagai penyebab. Aspek-aspek kerentanan sebenarnya bisa dihindari agar di masa depan tidak terjadi jatuhnya korban jiwa yang tidak perlu.

Untuk di daerah Kabupaten Bandung sendiri, peneliti melihat ada dua penyebab yang mendominasi, yakni pandangan *Nature as cause*, dan *Societal Structure as cause*. Pandangan pertama karena memang Kabupaten Bandung sendiri sudah rawan bencana dan tergolong multi-hazard, sehingga tingkat kerentanan masyarakatnya untuk terekspos terhadap bencana memang lebih tinggi. Sementara itu pandangan kedua juga ikut mempengaruhi tingginya jumlah korban pada saat kejadian bencana, karena berasal dari faktor ‘manusia’ termasuk bagaimana pemerintah belum secara maksimal mampu mengaplikasikan pembangunan yang lebih sadar bencana. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kepadatan penduduk yang tinggi di daerah-daerah tertentu, kurangnya infrastruktur, perencanaan tata kota yang buruk, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pengetahuan kemanusiaan dan kebencanaan, dan lain-lain.

Dalam FGD yang dilaksanakan, diketahui bahwa PMI dalam menanggulangi bencana tidak bisa berdiri sendiri, terutama PMI di tingkat Kabupaten. Hal ini terkait dengan keterbatasan, baik berupa dana, SDM, serta peralatan yang kadang kurang mendukung. Dukungan serta koordinasi dengan lembaga lain seperti pemerintah dalam hal ini BPBD, SAR, Pemadam Kebakaran, TNI, serta lembaga swasta lainnya justru sangat diperlukan. Kerentanan manusia terhadap bencana dianggap sebagai masalah yang bersifat ‘*seasonal/musiman*’. Padahal masalah struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil bisa berdampak pada kerentanan masyarakat terhadap bencana semenjak sebelum, selama, dan sesudah bencana itu terjadi.

PMI telah melakukan tugasnya dengan cukup baik, terutama PMI Kabupaten Bandung, baik dalam hal penanggulangan bencana, persiapan pra bencana, serta pasca bencana. Terbukti dengan adanya kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut dalam tahapan-tahapan di atas. Namun, sangat penting untuk tidak membiarkan PMI berjalan sendiri dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi bencana. Pada struktur sosial, terdapat peran besar politik, dalam hal ini pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan evaluasi terhadap

kebijakan pembangunan di suatu daerah. Pembangunan baik dalam hal ini tata kota, infrastruktur, sarana-prasarana, haruslah dengan mempertimbangkan aspek bencana di Indonesia. Pembangunan yang abai melihat bencana akan menimbulkan tingkat destruksi yang semakin besar, yang dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat ketika bencana itu terjadi. Menekan tingkat kematian bahkan hingga menjadi nol saat bencana besar terjadi, menunjukkan tingginya kesadaran dan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Masa *recovery* pun akan semakin cepat meskipun terjadi bencana, bila masyarakat telah dibekali pengetahuan dan keahlian tanggap bencana. Lembaga seperti PMI pun akan bisa melakukan tindakan cepat tanggap karena dukungan optimal berbagai pihak.

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa ada aspek “sosio-natural” bencana, sebuah konsep yang menunjukkan bahwa peristiwa alam hanya menjadi bencana ketika bencana itu mempengaruhi masyarakat yang tidak siap menghadapinya. Selain itu, sangat penting bagi pemerintah pusat, pemerintah lokal, dan komunitas atau LSM memiliki pola koordinasi yang baik dan terstruktur, terutama karena negara Indonesia hampir seluruh daerahnya termasuk ke dalam wilayah rawan bencana. Pentingnya edukasi menyeluruh pada masyarakat tentang kemanusiaan dan kebencanaan perlu terus dilakukan, agar masyarakat tidak mudah menyalahkan alam atau Tuhan saat jatuhnya korban jiwa, tanpa melihat pada kesalahan manusia itu sendiri sebagai kontributor utama dalam menghadapi bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Dendi Ramdhani. (2017). Banjir di Kabupaten Bandung, 4.000 Rumah Tergenang. Kompas.com - 16/11/2017
<http://regional.kompas.com/read/2017/11/16/20101041/banjir-di-kabupaten-bandung-4000-rumah-tergenang> 05/02/2018
- IFRC. National Societies Directory. <http://media.ifrc.org/ifrc/who-we-are/national-societies/national-societies-directory/> 08/02/2018
- IFRC. Promoting principles and values. <http://www.ifrc.org/en/what-we-do/principles-and-values/> 08/02/2018

IFRC. The Movement. <https://www.ifrc.org/en/who-we-are/the-movement/>.
05/12/2018

Gatignon, Aline, Luk N. Van Wassenhove, Aurelie Charles. International Journal of Production Economics 126 (2010) 102-110
www.elsevier.com/locate/ijpe doi: 10.1016/j.ijpe.2010.01.003

Heijmans, Annelies . 2004. From Vulnerability to Empowerment. In Bankoff, G.. et. al. (Eds). Mapping Vulnerability: Disasters, Development and People. London: Earthscan. 116-117

Jabar Ekspres. Donor Darah, RSUD Cicalengka Gandeng PMI Kabupaten Bandung, Internet, 14 April 2018, <http://jabarekspres.com/2018/donor-darah-rsud-cicalengka-gandeng-pmi-kabupaten-bandung/> 12/12/2018

Jusmalia Oktaviani, Christy P. Kumesan, Saltiq Fajar. Dipublikasikan dalam Jurnal Sospol Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2017, Hlm 42-57

Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi, Bandung, Palang Merah Indonesia. Sejarah PMI. <http://www.pmi.or.id/index.php/tentang-kami/sejarah-pmi.html?showall=1&limitstart=05/12/18>

PMI Kabupaten Bandung. Profil PMI Kabupaten Bandung.
<https://www.pmkabbandung.or.id/profil-pmi-kab-bandung/>. 05/12/2018.

Reni Susanti. Kompas. 2017. Banjir dan Longsor Dominasi Bencana di Jawa Barat. 26/04/2017. Kompas.com. 05/02/2018.
<http://regional.kompas.com/read/2017/04/26/20565581/2017.banjir.dan-longsor.dominasi.bencana.di.jawa.barat>.

Rina Widiastuti. Bencana Longsor di Kabupaten Bandung Menewaskan Satu Keluarga. 3/10/2017 <https://nasional.tempo.co/read/1029453/bencana-longsor-di-kabupaten-bandung-menewaskan-satu-keluarga> 05/02/2018

Sulaeman, Peringatan Hari PMI ke 72 yang Digelar di Markas PMI Kab. Bandung 09 oktober 2017, Inbewara,
<http://www.inbewara.com/2017/10/09/peringatan-hari-pmi-ke-72-yang-digelar-di-markas-pmi-kab-bandung/>